**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Wisata pantai Teluk Kiluan terletak di Pekon (desa) Kiluan, kecamatan Kelumbayan, kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung cocok bagi wisatawan yang gemar berpetualang. Topografinya yang berbukit dan berlembah merupakn tantangan tersendiri bagi wisatawan. Di pulau ini terdapat kumpulan lumba-lumba yang jumlahnya ratusan ekor yang terdiri dari spesies *tursiops truncatus* dan spesies *stenella longirostris*. Selain itu terdapat beberapa pulau yang indah dan bisa dikelilingi dengan perahu Katir. Pada waktu sore hari, banyak primata berbulu hitam dan bersuara nyaring saling bersahutan, seperti siamang (*symphalangus syndaactylus*), simpai (*presbythis melalops*), dan kukang (*nycticesbus coucang*).

Keindahan alam pantai Teluk Kiluan sebagai salah satu kekuatan utama kepariwisataan di Lampung dalam peta kepariwisataan dunia. Keunikan pantai dan lumba-lumba telah memosisikan Teluk Kiluan sebagai salah satu objek yang termasuk dalam situs warisan budaya Indonesia sehingga berkemampuan untuk menggerakkan minat wisatawan untuk melakukan kunjungan. Penetapan pantai Teluk Kiluan sebagai warisan budaya Indonesia dinilai strategis terutama sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian sumber daya yang berbasis kekuatan nilai-nilai budaya yang ada, mendorong pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

**1.2 Masalah Penelitian**

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan Wisata pantai Teluk Kiluan belum berpihak kepada masyarakat sekitar. Contohnya, objek wisatanya merupakan aset pariwisata yang dijual untuk kepuasan wisatawan. Namun, pengembangan pariwisata tidak berpihak kepada kehidupan masyarakat. Masyarakat tetap miskin sementara investor meraup keuntungan besar dari aktivitas pariwisata ini. Padahal, jika tidak ada objek pariwisata pantai di Teluk Kiluan maka kehidupan perekonomian masyarakat relatif tidak akan berkembang.

Kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kaum kapitalis (investor). Investor dibiarkan membangun fasilitas wisata berupa vila di tengah perkampungan berdekatan dengan kawasan pemukiman masyarakat. Masuknya kaum kapitalis ini dalam pengembangan wisata pantai membangun area kompetisi ekonomi. Kompetisi tidak saja dalam perebutan lapangan pekerjaan juga dalam hal modal. Kelompok kapitalis lokal bersaing dengan pemodal kuat dari luar desa bahkan berasal dari luar Lampung. Jika kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang. Ketidakadilan berpotensi terjadinya konflik. Oleh karena itu, memberi ruang gerak bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan sangat diperlukan. Jika tidak, kenyamanan desa akan dipertaruhkan dan objek wisata ini dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat desa.

**1.3 Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa dan mengkaji model pengembangan wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pengembangan wisata yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan agar dapat berperan strategis dalam pengembangan pariwisata. Pihak terkait dapat berpartisipasi dalam peningkatan kompetensi masyarakat lokal untuk pemberdayaan masyarakat lokal.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pembangunan berbasis masyarakat (*community based tourism*-*CBT*) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa dan wisata.

Inskeep (1991) mengatakan bahwa objek wisata di pedesaan merupakan bentuk pariwisata di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil. Nuryanti (1992) mendefinisikan wisata di pedesaan merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam wisata di pedesaan, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit- unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik .

Pearce (1995) mengartikan pengembangan wisata di pedesaan sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa dan pariwisata. Secara lebih spesifk, pengembangan wisata di pedesaan diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatannya. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan wisata dipedesaan tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangannya dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.



**PEMERINTAH**

**DUNIA USAHA**

**MASYARAKAT**

**Gambar 1**

**Pemangku Kepentingan dalam pengembangan Pariwisata**

**Sumber: diadaptasi dari Wearing (2001**

Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata di pedesaan menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa dan wisata (Nasikun, 1997). Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.

Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Selain mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, Timothy memandang pentingnya mengikutsertakan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata.

Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata karena masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan. Pandangan ini serupa dengan Abe (2002) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan kepemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat Abe ini diperkuat oleh Sanof (2000), Randolph (2004), Adiyoso (2009). Makna partisipasi menurut Arnstein (1969) adalah sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan.

Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil-hasilnya.

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, aspek partisipasi merupakan isu mendasar. Partisipasi masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi pencapaian pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.

**BAB III. METODE PENELITIAN**

Kajian pengembangan wisata yang berbasis partisipasi masyarakat ini menggunakan metode pendekatan kualitatf. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan fenomena secara mendalam yang digali melalui pandangan dan pengalaman masyarakat. Kelebihan pendekatan ini bisa mendapatkan perspektif yang lebih alami dari suatu kehidupan masyarakat dan membuka peluang untuk pendalaman yang lebih rinci dari pandangan- pandangan individu dalam masyarakat (Lewis, 2003).

Data yang digunakan di dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menghasilkan data primer digunakan wawancara individu untuk memperoleh pan- dangan-pandangan dan informasi mengenai pengalaman-pengalaman keikutsertaan masya- rakat dalam proses pengembangan desa wisata. Teknik ini sangat bermanfaat dalam penelitian sosial karena wawancara mendalam dapat menggali keterangan dan pandangan- pandangan dan pengalaman-pengalaman masyarakat lebih mendalam. Panduan wawancara digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan data dari orang-orang yang menjadi informan.

Wawancara dan pengamatan lapangan dilakukan dengan informan terpilih seperti, Kepala Desa, tokoh adat, pemilik rumah dan penginapan, para petani dan nelayan, sesepuh desa, dan pemilik tanah dan villa, LSM dan investor. Keseluruhan jumlah informan dalam studi ini sebanyak 22 orang. Pemilihan informan dilakukan secara *snowball sampling*, dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada (1) mereka yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan wisata pantai Teluk Kiluan, (2) mereka yang memiliki pengetahuan dan bersikap kritis terhadap berbagai kasus yang muncul akibat pengembangan wisata, dan (3) mereka yang berpengetahuan terkait prinsip-prinsip pengembangan wisata.

Selain data primer dari wawancara, pengamatan langsung juga digunakan. Kombinasi hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan data komprehensif dan bermakna. Selain data primer, digunakan juga data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku, laporan terbitan pemerintah, jurnal- jurnal, Koran, *website*, dan sumber-sumber lain. Ketersediaan data di situs penelitian cukup lengkap dan sangat membantu studi ini. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Data diinterpretasikan dan dianalisis melalui evaluasi, justifikasi, dan dibahas sesuai dengan tinjauan pustaka dan dibandingkan dengan data yang ada.

**BABIV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan wisata. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan. Berikut ini akan dijelaskan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahap pengembangan sebagai berikut.

**4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Tahap** **Perencanaan**

Parameter yang digunakan untuk menentukan derajat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata. Tulisan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengaku tidak dilibatkan dalam identifkasi masalah dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan objek wisata. Mereka tidak pernah diajak berdialog dalam mengidentifkasi kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini terjadi, karena (1) gagasan pengembangan desa wisata dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik sumber daya, sehingga masyarakat kurang memahami latar belakang pengembangan pariwisata; (2) masyarakat lokal hanya menjalankan apa yang diprogamkan oleh pemerintah, misalnya, kesediaan menerima kedatangan wisatawan dan menyerahkan lahan untuk dibangun fasilitas wisata; dan (3) masyarakat lokal tidak berkekuatan untuk berpartisipasi aktif dalam arti ikut memberi warna terhadap keputusan yang akan diambil oleh penguasa.

Pada tahap ini, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tergolong semu. Benefit yang diperoleh dari bentuk partisipasi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat lokal atas keputusan yang diambil oleh penguasa sering diabaikan. Padahal substansi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Teluk Kiluan seharusnya bersifat aktif dan langsung. Namun, selalu dihadang oleh keputusan penguasa yang bersifat *top-down*. Mekanisme seperti ini menjadikan masyarakat tidak terbiasa berpartisipasi. Ketergantungan terhadap pemerintah dan investor tinggi.

Kondisi ini berakibat pada kurangnya respons, antusiaisme, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan asset-aset di wilayah mereka. Dalam hal keaktifan masyarakat Teluk Kiluan, hasil penelitian menemukan bahwa kehadiran warga dalam pertemuan desa cukup antusias. Walaupun warga masyarakat banyak yang hadir dalam setiap pertemuan, pada umumnya mereka mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perihal pengembangan wisata. Dalam hal keterwakilan masyarakat pada rapat-rapat, biasanya perangkat desa hanya mengundang beberapa warga yang merupakan perwakilan tiap-tiap RT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40 persen warga mengaku jarang diundang dalam pertemuan di desa. Sebanyak 25 persen bahkan menyatakan tidak pernah diundang dalam pertemuan yang membahas pengembangan desa wisata.

Isu menarik lainnya adalah keterwakilan masyarakat. Meskipun peserta yang hadir dalam perencanaan pengembangan wisata pantai Teluk Kiluan berasal dari berbagai latar belakang, hal ini belum mencerminkan keterwakilan. Pertemuan-pertemuan itu biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat adat dan dinas, warga masyarakat yang berpendidikan, misalnya guru, pegawai negeri sipil, dan rohaniawan, yang secara resmi diundang oleh kepala desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan wisata pantai Teluk Kiluan belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat karena dominasinya adalah golongan menengah ke atas, termasuk para pelajar, orang berpendidikan, dan para pemimpin informal.

**4.2** **Partisipasi Masyarakat Lokal dalam** **Tahap Implementasi**

Parameter Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi adalah keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata, misalnya, sebagai pengelola penginapan, pengelola rumah makan, pemandu wisata, karyawan hotel, karyawan hotel, dan pengelola atraksi wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implentasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usaha- usaha berskala kecil. Hal ini terlihat kontras dengan partisipasi masyarakat luar yang memonopoli usaha berskala besar. Misalnya, dari tujuh fasilitas wisata berupa 4 buah sarana akomodasi dan 3 buah restoran, lima di antaranya dikelola oleh orang luar daerah, dan hanya dua buah yang dikelola oleh masyarakat lokal. Penyebabnya adalah karena peluang usaha tersebut memerlukan modal besar, risiko bisnis yang tinggi, persaingan ketat, dan menuntut kompetensi yang tinggi. Masyarakat Teluk Kiluan dengan kompetensi bisnis yang rendah dan keterbatasan modal menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal besar yang umumnya berasal dari luar desa. Ironisnya, para pemilik modal besar tidak hanya menekuni usaha berskala besar, juga mengambil alih usaha berskala kecil yang pada mulanya dikelola masyarakat lokal. Akibatnya, sebagian besar hasil usaha- usaha tersebut tidak terdistribusi di tingkat lokal melainkan mengalir keluar desa.

Intervensi modal yang merambah sampai wilayah pedesaan, menyebabkan terjadinya proses marginalisasi pada tatanan posisi sosial ekonomi masyarakat. Pengembangan wisata dipandang sebagai neokapitalis yang hanya mengeksploitasi masyarakat lokal, sementara keuntungan dan manfaat pengembangan wisata sebagian besar dinikmati kaum kapitalis. Kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar lapisan masyarakat semakin besar, pada akhirnya, masyarakat lokal tetap berada di posisi marginal dalam usaha yang justru terjadi di wilayahnya sendiri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan wisata pantai Teluk Kiluan belum bermanfaat ekonomis bagi masyarakat setempat.

**4.3** **Partisipasi Masyarakat Lokal dalam** **Tahap Pengawasan**

Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan wisata karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat pelaksanaan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatip yang terjadi akibat pengembangan wisata pantai Teluk Kiluan. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal. Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata terlihat minim. Alasannya, karena perencanaan pengembangan dilakukan oleh pemeritah secara *top-down*, sehingga masyarakat tidak berkompotensi untuk melakukan pengawasan, di samping itu pengawasan oleh masyarakat dimaknai oleh pemerintah sebagai tindakan memata-matai program yang dilakukan pemerintah sehingga berujung terjadinya konflik.

Pada akhirnya, masyarakat memilih berpartisipasi pada pengawasan yang bersifat preventif untuk mencegah tindakan- tindakan negatif yang dapat menggangu keamanan desa, misalnya, mengawasi kehidupan anak muda yang mabuk-mabukan, pengawasan terhadap pedagang yang berjualan di sekitar, dan pengawasan parkir kendaraan yang tidak teratur dan sering menimbulkan kemacetan. Sedangkan pengawasan yang bersifat lebih kompleks seperti pelanggaran tata ruang, pelanggaran keamanan, sebagian besar warga bersikap tidak peduli, padahal secara substansi seharusnya masyarakat lokal ikut mengawasi. Selama ini pengawasan yang bersifat kompleks hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat yang kritis termasuk elite masyarakat lokal.

**4.4 Model Pengembangan Pariwisata** **Berbasis Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan model yang relevan dalam pelaksanaan program tersebut. Model dipandang sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program. Sebagai sebuah pendekatan, model yang dirumuskan harus merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam setiap aspeknya.

Harapan masyarakat desa Teluk Kiluan dalam pengembangan wisata kedepan adalah (1) pengembangannya harus berpedoman pada falsafah hidup berdasarkan agama yang mengajarkan perlunya hubungan harmonis antara manusia dengan sang pencipta, dengan sesamanya, dan dengan alam lingkungannya guna mencapai kesejahteraan lahir batin; (2) masyarakat harus terlibat penuh dalam pengembangan kegiatan wisata; (3) menghargai hak-hak masyarakat lokal; (4) memperhatikan kelestarian lingkungan; (5) pemanfaatan rumah penduduk untuk akomodasi wisatawan; dan (6) ada kelembagaan otonom dan mandiri yang dibentuk oleh masyarakat lokal dibawah tanggung jawab.

Ada jaminan bahwa masyarakat harus terlibat di dalamnya agar program pengembangan wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin hal itu dirumuskan hal-hal sebagai berikut. (1) pengembangan wisata harus berpedomanan pada harmonisasi; (2) masyarakat lokal menjadi sentral dan menjadikan subjek dari semua proses pengembangan wisata. Dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral diharapkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik sumber daya pariwisata akan terdorong dan mampu menyejahterakan masyarakat lokal; (3) pengembangan wisata membutuhkan adanya kemitraan yang solid antara tiga unsur utama, yaitu pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, yang masyarakat lokal menjadi pemangku kepentingan dari kerja sama tersebut. *The golden triangle* hanya dapat berhasil diterapkan apabila pemrakarsa kemitraan mengerti hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kerja sama; (4) ketiga pemangku kepentingan tersebut berada pada posisi yang sejajar dalam melakukan kerja sama serta saling menghormati; (5) perlu dibentuk badan pengelola yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi, memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi; (6) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dibuat ditingkat lokal warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan; dan

 (7) fokus utama pengembangan wisata adalah memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengarahkan dan mengatasi ase-aset yang ada pada masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya. Pada model tersebut terdapat kaitan antara faktor internal dan eksternal sebagai pendamping dan motivator seperti institusi pemerintah, LSM, akademisi, asosiasi, dan dunia usaha/investor. Selanjutnya, pelaksanaannya memperhatikan fungsi manajemen dan sumber daya yang dimiliki (SDM, peralatan, modal, material, dan informasi). Model pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat seperti terlihat pada gambar 1.

Pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan tersebut terarah, peran dan tanggug jawab masing-masing harus jelas. Peran dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut. Peran dan kewenangan Pemerintah, yaitu (1) melakukan pembinaan kualitas produk dan kemasan kerajinan dan kuliner khas desa sebagai unsur kenangan wisata; (2) melakukan penataan dan konservasi lingkungan kawasan yang menjadi ciri khas wisata; (3) melakukan perbaikan/pengadaan infrastruktur persampahan dan sanitasi; (4) melakukan gerakan masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona; (5) melakukan pembuatan informasi dan fasilitas kepariwisataan; (6) melakukan perbaikan/peningkatan kualitas ruang publik, dan (7) dukungan pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pelestarian lingkungan pariwisata (kawasan Hutan, dan pantai).

Peran dan Kewenangan Swasta (Investor, Perguruan Tinggi, LSM, pelaku pariwisata lainnya), yaitu (1) melakukan promosi terintegrasi antar pengelola objek wisata untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar objek wisata; (2) pembuatan dan pemasaran paket-paket wisata yang kompetitif dan terjangkau masyarakat; (3) pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan individual terkait usaha dibidang pariwisata (pelatihan bahasa Inggris, pelatihan *hospitality*, pelatihan mengenal budaya, dan karakteristik wisatawan dalam dan luar negeri); (4) pengembangan kelompok usaha bersama masyarakat; dan (5) menjalankan bisnis perhotelan, restoran, suvenir, dan lain-lain. Peran masyarakat Lokal, yaitu (1) menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional, upacara adat, kerajinan tangan dan kebersihan merupakan beberapa contoh peran yang memberikan daya tarik bagi pariwisata; (2) pelaku budaya, misalnya, kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata; dan (3) penyedia akomodasi dan jasa pemandu wisata, penyediaan tenaga kerja, produk makanan khas, kerajinan lokal, kesenian lokal, dan sebagainya. Peran dan Kewenangan Badan Pengelola, yaitu (1) badan pengelola sebagai pengelola utama dan pengarah dalam perlindungan, perawatan, pelestarian guna mempertahankan fungsinya sebagai desa dalam pengembangan wisata ; (2) melakukan pengaturan yang diperlukan dalam rangka pengembangan Wisata; (3) menyediakan dan mengoperasikan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha; (4) memberikan dan mecabut izin penempatan, menetapkan persyaratan-persyaratan, dan menetapkan serta melakukan pungutan segala usaha komersial; (5) menetapkan dan memungut biaya/retribusi dan pungutan lainnya atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia dan hasil seluruhnya merupakan pendapatan badan pengelola; (6) melakukan perencanaan dalam bidang pengembangan atraksi/produk wisata, pengembangan fasilitas wisata; (7) melakukan pengorganisasian dalam bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan; (8) melakukan pengarahan untuk peningkatan kompetensi pengelola objek wisata agar sesuai dengan tujuan pengembangan wisata pantai yang berkelanjutan; dan (9) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas kepariwisataan agar tercapainya tujuan pengembangan wisata yang berkelanjutan.

**BAB V. SIMPULAN DAN IMPEMENTASI**

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di wilayah ini. Masyarakat belum menjadi subjek pembangunan, tetapi masih menjadi objek pembangunan.

Masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Teluk Kiluan perlu diajak untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Selama ini pariwisata yang dikembangkan di desa wisata pantai Teluk Kiluan tersebut tidak pernah di desain oleh mereka sehingga masyarakat lokal terpinggirkan. Pengembangan wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Untuk menjamin hal itu diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi peranannya dalam pengembangan wisata dan memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan kata lain adanya peran kelembagaan sebagai mediasi berbagai kepentingan, agar semua kepentingan berjalan secara aman dan tidak saling menghambat. Selama ini masyarakat terbiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan tidak dibiasakan berpartisipasi.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat di mainkan perannya oleh masyarakat yaitu partisipasi insentif, ialah bentuk partisipasi yang menghasilkan kompensasi pembayaran kepada masyarakat, partisipasi inisiatif, partisipasi mengedepankan perubahan pengetahuan dan skill, dan partisipasu interaktif yakni memberikan sumbangan fikiran kritis baik di forum rapat, membuat rencana sampai dengan evaluasi.